

KOMPAS	POS KOTA	MERDEKA	H. TERBIT	MUTIARA
PR. BAND	A. B.	BISNIS	PAND POS	MEDIA INDONESIA
B. BUANA	PELITA	S. KARYA	JAYAKARTA	REPUBLIKA
SRIWI POS	SERAMBI	BERNAS	S. PAGI	S. PEMBARUAN
Minggu	Senin	Selasa	Rabu	Kamis
				Jum'at
				Sabtu

HARI TGL : 27 MAR 1994

LAL :

# Ditunggu, Film Tema Seks Yang Bermutu

**K**elonggaran yang diberikan pemerintah kepada dunia film nasional pada tema-tema seks ternyata memberi fenomena sendiri. Paling tidak melihat film-film nasional yang kini beredar yang tak pernah luput dari ranjang, masyarakat jadi prihatin dan bertanya-tanya; Mau dikemanakan film nasional kita?

Prof. Dr. Sudjoko, pengamat film nasional saat ditemui *Suara Karya* mengomentasi maraknya film nasional bertema seks saat ini karena film-film tersebut punya penonton tersendiri.

"Terutama penonton yang tidak mepedulikan cerita, tapi khusus untuk melihat adegan seksnya saja," tambah Sudjoko. Melihat peluang adanya penonton seperti inilah Sudjoko memandang perusahaan film berebutan membuat film bertema seks.



Prof. Dr. Sudjoko

"Yang penting mereka membuat film yang laku, sehingga bisa mengambil untung dan terus membuat film secara berkesinambungan," ujar dosen di Fakultas Seni Rupa dan Desain ITB ini.

Sayangnya menurut Sudjoko film-film bertema seks

ini tidak disertai mutu yang memadai. Ia mencontohkan film *Hamil Muda* yang baru ditontonnya. "Pemainnya kaku sekali. Jadi adegan seksnya pun tidak ada apa-apanya. Padahal film itu dibintangi artis beken macam Ully Artha," untkannya.

Padahal kalau dibandingkan dengan film-film seks luar negeri, banyak yang bermutu dan memenangkan penghargaan internasional. "Sebenarnya kalau mau, kita juga bisa membuat film tema seks yang bermutu," tandas Sudjoko.

Melihat kondisi seperti ini Sudjoko pesimis dengan niat pemerintah mengembalikan kejayaan film nasional lewat kelonggaran tema seks. "Kalau memajukan dari segi mutu jelas mustahil. Tapi kalau sekadar meramaikan saja jelas bisa," ujarnya.

Untuk memajukan film nasional yang mengalami

penurunan sejak tiga tahun ke belakang, Sudjoko tidak setuju bila insan film hanya mengandalkan kebijaksanaan-kebijaksanaan pemerintah. "Dulu pernah ada pembatasan film Barat, tapi akibatnya malah bioskop kosong karena tidak ada film yang diputar. Akhirnya banyak bioskop yang berubah jadi tempat hiburan ataupun restoran," papar Sudjoko.

Ia juga tidak menyetujui cara pemerintah dengan mengupayakan pihak pemda provinsi membuat film. "Nyatanya tidak berhasil. Jangan-jangan nanti setiap kecamatan dan akhirnya tingkat desa diminta membuat film," sindirnya.

Sudjoko pun malah berani menganggap komentar-komentar negatif dari beberapa pihak tentang film tema seks yang serba vulgar. "Yang dibutuhkan saat ini bukan cuma komentar saja, tapi juga jalan ke luarnya. Karena sulit dengan kondisi seperti saat ini menginginkan suatu film yang sopan-sopan tapi bagus. Perlu perumusan orang-orang yang ahli di dunia film. Nah, disinilah faktor utamanya. Kita saat ini ku-



KOMPAS	POS KOTA	MERDEKA	H. TERBIT	MUTIARA
PR. BAND	A. B.	BISNIS	BAND POS	MEDIA INDONESIA
B. BUANA	PELITA	S. KARYA	JAYAKARTA	REPUBLIKA
SRIWI POS	SERAMBI	BERNASS	S. PAGI	S. PEMBARUAN
Minggu	Senin	Selasa	Rabu	Kamis
				Jumat
				Sabtu

HARI TGL :

HAL :

**DITUNGGU, FILM**

rang orang-orang ahli dalam dunia film," tegasnya.

Dengan nada prihatin Sudjoko mempertanyakan seberapa banyak insan film nasional yang punya latar belakang pendidikan film. "Coba tanyakan dengan bintang film kita, pernah tidak ia belajar akting. Kalau pernah belajar, dengan siapa ia belajar. Apa yang mengajarnya juga baik. Begitu juga dengan penulis skenario. Dari mana mereka belajar? Buku-buku, apa yang mereka punya?" tutur-nya.

Sudjoko mengibaratkan dunia film tak jauh dengan dunia olah raga. "Lihat saja perenang kita setelah dilatih dan dididik di Amerika Serikat, banyak yang maju. Sedangkan dunia film mana ada yang mau belajar sampai ke luar negeri begitu. Ibaratnya, apa mungkin dunia sepakbola maju cuma dengan membelikan baju, sepatu dan jaket yang bagus," simpulnya.

Prof Dr Sudjoko optimis bila ahli perfilman kita bertambah dunia film akan maju. Jadi sekalipun film nasional kita marak dengan tema seks pun bukan yang sekadar meraup laba, tapi juga memiliki mutu.

**Kalah Bersaing**

Berbeda dengan pengamat film Prof Dr Sudjoko, Ketua Ikatan Sosiologi Indonesia Cabang Jabar, Dr Barita E Siregar yang juga mantan anggota FKP DPRD Jabar menyebutkan longgarnya pihak Deppen dan perizinan produksi film serta "agak ditumpulkannya" gunting sensor BSF yang saat ini bergulir,

bukanlah jalan ke luar untuk menghidupkan dunia perfilman nasional. Sebab menurut dia, cara itu dianggap kurang tepat, karena bagaimana pun film nasional akan tetap kalah bersaing dengan film Barat (impor).

Selain itu, kegandrungan penonton pun menurut Barita tak bisa dipungkiri sampai saat ini masih cenderung ke film-film impor. Jadi untuk menghidupkan dunia perfilman nasional bukan cuma melonggarkan izin produksi bahkan menghapus sekalipun dan menumpulkan gunting sensor, melainkan juga harus dipikirkan bagaimana membentuk sistem agar film nasional bisa bersaing dengan film impor. Contohnya, lanjut Barita, film-film bermutu produk negara Barat atau Amerika sudah pasti memakan biaya produksi yang tinggi, tetapi mereka bisa lempar ke pasar film kita, bisa lebih murah dibanding film produk nasional. "Ini satu dilema yang harus dipikirkan serius agar film nasional bisa bersaing, dan juga kualitas film nasional masih di bawah film impor," paparnya.

Kalau mau, tandas Barita, Deppen jangan sekadar mengatur soal ke luar atau tidaknya izin produksi, tetapi juga harus bertanggung jawab terhadap pemasarannya. "Saya menangkap kesan Deppen selama ini hanya mengurus soal izin dan sensor. Padahal harus lebih banyak yang dilakukan untuk menghidupkan film nasional, misal dengan memberi sub-

sidi silang untuk produksi," paparnya pula.

Dengan dilonggarkannya sensor itu Deppen pun harus berpikir soal dampak. Sebab mau tidak mau menurut Barita film atau produk satu film, itu sebagai cermin dari satu kondisi sosial masyarakat pada waktu itu. "Apa mau bangsa ini disebut sebagai bangsa yang mengumbar paha dan buah dada; sekaligus seks," tandasnya.

Barita yang juga mengaku sering memperhatikan film nasional, menyatakan tidak setuju dengan kebijakan Deppen dan produk film nasional yang belakangan ini banyak diwarnai tema-tema seks. Itu tak apa lanjutnya, asal adegan-adegan yang mengeksploitasi bagian-bagian tubuh yang sensual dikemas dengan rapi atau tidak vulgar seperti pada film *Gadis Malam* yang baru ditontonnya, atau *Bagi-Bagi Dong*.

Mengingat film dinyatakan sebagai produk budaya maka film harus benar-benar mencerminkan kondisi budaya nasional. "Saya pikir kalau diolah dengan profesional film kita pun laku dan bermutu. Kenapa tidak, kita pernah membuat film non tema seks seperti *November 1828*," tukasnya.

Sementara itu, sutradara film yang baru merampungkan garapannya dua bulan lalu, *Gadis Malam* Ackyl Anwari, mengaku walau filmnya bertema seks namun dia mencoba memolesnya dengan masalah-masalah sosial. "Ini bukan semata untuk mengelabui penonton, namun justru

masalah seks ini larut dengan masalah-masalah sosial. Artinya menurut dia dalam soal memproduksi film unsur munafik jangan terlalu mengemuka. Sebab mau tak mau urusan seks itu menjadi masalah keseharian yang terkadang sebagai penyebab munculnya berbagai tragedi di lingkungan masyarakat kita.

Di singgung soal film-film nasional yang belakangan ini cenderung buka-buka paha dan bertema seks, Ackyl jujur menyebutkan bahwa itu sebagai kiat untuk menembus kelesuan pasar film nasional. Namun begitu lanjut dia, soal berdampak negatif atau positif tergantung kaca mata menontonya. "Kalau pikirannya ngeres, jangankan yang terbuka (vulgar) yang ngumpet aja bisa menimbulkan dampak," paparnya.

(Adinda/BenR)